

FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTING WAJO THE COUNTY LOCAL GOVERNMENT

Dian Hajra

Email: dyanhajra@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jamaluddin Majid

Email: Jamalmajid75@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This study aims to see whether the quality of human resources, the application of accounting standards, and information governance affect the financial reporting of local governments in Wajo Regency. The population of this study was all employees of the financial division of the SKPD in the scope of Wajo Regency, namely the Department of Public Works for Spatial Planning and Land, the Office of Health, and the Office of Agriculture and Food Security. This type of research is quantitative research. Collecting data from filling out questionnaires. The data collected were processed using SPSS with multiple linear regression analysis to test the hypothesis. Based on the results of research, the government can ignore that the quality of human resources and the application of accounting standards have a positive effect on regional financial reporting. Meanwhile, the use of information technology does not affect local government financial reporting. This may be since the SKPD is lacking in maximizing the integrated computer system.

Keywords: *Quality of Human Resources, Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Reliability of Regional Government Financial Reporting*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di SKPD lingkup Kabupaten Wajo yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dari pengisian kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan SPSS dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan karena SKPD kurang memaksimalkan penggunaan sistem komputer yang terintegrasi.

Kata Kunci : *Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*

1. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses tata keuangan yang telah mengalami kemajuan sistem keuangan yang lebih modern. Laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Penerapan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Loli Efendi, 2017) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, karena meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) agar dapat menyediakan informasi yang andal mengenai seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas dengan tingkat keandalan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pelaporan keuangan dikatakan andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara

jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau proses menentukan kebenaran laporan keuangan. Fenomena yang ada dalam sektor publik, dimana masyarakat menuntut pemerintah agar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercapai untuk mewujudkan good governance.

Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan yang terkait dengan pengukuran kinerja dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pada sektor publik.

Untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan kewajaran dari penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam tercapainya opini WTP, pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan acuan dari standar akuntansi pemerintahan (SAP). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh dari sumber daya yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para stakeholder.

Pemanfaatan dari teknologi informasi yaitu mampu memberikan keceptan dalam memproses transaksi dan menyiapkan laporan serta keakuratan dalam perhitungan. Dari sisi akuntansi peningkatan total volume Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan luar

biasa serta menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks harus diikuti dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah (Ananda Iphan Kosegaran, 2017).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada periode tahun 2015-2019. Hal ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa untuk mendukung program kerja nyata dalam zona integritas menuju kawasan bebas korupsi (Kata Sulses.com, 2019). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan melihat hasil audit bahwa Kabupaten Wajo selama 5 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat menarik untuk diteliti, penelitian ini dilakukan di beberapa SKPD di lingkup Kabupaten Wajo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang menyatakan bahwa secara umum hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen)

untuk melakukan suatu jasa atas nama principal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam akuntabilitas publik, pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan suatu pertanggungjawaban dari segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sudut perspektif akuntansi sektor publik dalam pemerintahan merupakan pemerintah sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah atau *stake holder* dalam perannya sebagai principal yang berhak membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dan menilai akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi bersangkutan.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi pada suatu entitas dengan suatu periode akuntansi yang dapat digunakan dengan tujuan tertentu dan dapat menggambarkan kinerja suatu entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan pada suatu entitas. Menurut Munawir (2010) pelaporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu instansi. Laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh

pemerintah diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.3 Keandalan Pelaporan Keuangan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid (Muslikha, 2015). Keandalan pelaporan keuangan harus menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah telah ditentukan berdasarkan empat karakteristik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (ASP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keandalan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan yang dapat diverifikasi, netralitas dan penyajian jujur.

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Irmawati, 2018). Komponen dalam pembentukan kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, skill dan sikap atau tingkah laku seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan instansi (Majid J,2018).

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

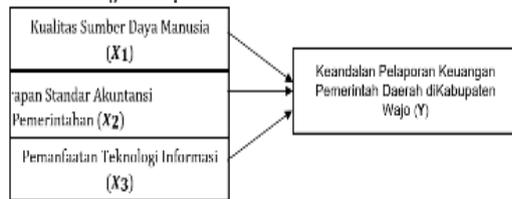
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi aturan hukum untuk meningkatkan kualitas dengan tingkat keandalan pelaporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat 12 pedoman dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sistem berbasis IT (Ilmu Teknologi) yang digunakan untuk mengolah data dalam memproses, menyusun dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu organisasi bisnis tetapi pada organisasi dibidang sektor publik.

2.7 Kerangka Konsep

Gambar 1 Kerangka Konsep



2.8 Hipotesis

a. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu fungsi atau kewenangannya pada suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dengan secara efektif dan efisien. (Loly Efendi, 2017) menyatakan bahwa dengan kapasitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia merupakan elemen sangat penting dalam organisasi agar mampu memberikan kontribusi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dito Aditia Nasution dan Nina Andriany Nasution (2019) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.

b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang mempunyai aturan hukum yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip akuntansi yang baik ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil penelitian (Muslikha Diawati, 2016) membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif dengan tingkat signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Bukti Penelitian ini didukung dari hasil penelitian (Mahaputra dan Putra 2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu organisasi bisnis tetapi pada organisasi dibidang sektor publik seperti pemerintahan untuk menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan manfaat teknologi informasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mengelola data transaksi dan menciptakan laporan keuangan yang andal, cepat dan memiliki keakuratan data.

Hasil penelitian dengan pernyataan Loly Efendi, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2017) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian (Yanto, 2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Validitas

Setiap pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pertanyaan untuk responden yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid

pengaruh positif terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desmiyawati, 2014) teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada SKPD di wilayah lingkup pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih pegawai yang berhubungan langsung dengan bagian keuangan pada SKPD. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan daftar pertanyaan yang dibuat untuk beberapa responden dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS 22 dan kemudian dianalisis dalam berbagai uji statistik.

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,836 > 0,60	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,927 > 0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,913 > 0,60	Reliabel
Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,897 > 0,60	Reliabel

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai

koefisien alpha dari semua variabel yaitu menunjukkan lebih besar dari nilai 0.60.

4.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,573 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 atau ($0,573 > 0,05$). Maka

Tabel 3: Uji Multikolinearitas

Variabel Independent (X _i)	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,576	1,763	Tidak ada problem multikolinearitas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,602	1,660	Tidak ada problem multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,675	1,482	Tidak ada problem multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan Nilai FIV < 10 untuk setiap variabel independen maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem multikolinearitas dalam model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser diketahui nilai signifikan untuk variabel x₁ adalah 0,006. Sementara nilai untuk x₂ sebesar 0,13. Nilai signifikan kedua variabel tersebut <

Jawaban responden tersebut dapat dikatakan reliabel.

sesuai pada dasar pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-smirnov data berdistribusi normal atau terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

0,05 maka hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser terjadi gejala atau problem heteroskedastisitas. Sedangkan nilai variabel dari x₃ adalah 0,385 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Hasil perhitungan model regresi yang diperoleh nilai konstan sebesar 0,613 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,491X₁, 0,377 X₂, 0,016 X₃. Sehingga persamaan regresinya adalah *Y*Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah = 0,613 + 0,491X₁ + 0,377 X₂ + 0,016X₃.

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5: Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.509	.29919
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia				
b. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020

Nilai R Square 0,559. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 55,9%. Sisanya 44,1% dihasilkan dari (100% -

55,9%), hal tersebut dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

b. Uji t dalam Analisis Regresi

Tabel 6: Uji t dalam Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.613	.691		.886	.384
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.491	.190	.446	2.579	.016
	penerapan standar akuntansi pemerintah	.377	.167	.379	2.258	.033
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.016	.144	.018	.114	.910

a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020

Hasil dari uji t diketahui nilai signifikan dari variabel X_1 sebesar 0,016. Nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ ($0,016 < 0,05$), maka H_1 diterima : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh (X_1) terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.5 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kualitas sumber daya manusia yang baik dan memiliki kompetensi (keahlian) dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi dalam suatu instansi dan dapat terwujudnya keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kualitas sumber daya

manusia yang mampu memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat atau akuntabilitas vertikal dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan pegawai bagian keuangan rata-rata memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 24 pegawai atau 80% dari 30 pegawai. Dengan tingkat pendidikan tersebut dapat memadai untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Diketahui nilai signifikan hasil uji t dari variabel X_2 sebesar 0,033 dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ ($0,033 < 0,05$), maka H_2 diterima : Penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.6 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintah harus mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Adanya penerapan dan pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan faktor penting dan mampu memberikan pengaruh keandalan pelaporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Dalam sudut perspektif teori keagenan merupakan pemerintah sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah atau stake holder sehingga dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah yang baik maka pengelolaan keuangan mampu dipertanggungjawabkan sebagai laporan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Semakin baik pemahaman dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari uji t diketahui nilai signifikan dari variabel X_3 sebesar 0,910. Nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ ($0,910 > 0,05$), maka H_3 ditolak : Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.7 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan tugasnya dan berfungsi untuk memproses informasi keuangan dan menjamin kebutuhan kualitas data akan digunakan dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan laporan keuangan yang andal. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Wajo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SKPD di lingkup Kabupaten Wajo belum secara optimal mengintegrasikan teknologi informasi dan faktor belim meratanya dalam penggunaan internet sehingga sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Adanya Teknologi informasi hendaknya terintegrasi/terpadu dan menjamin kebutuhan terhadap SKPD di Kabupaten Wajo. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam sektor publik untuk memproses informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

- Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.
- Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Hal ini mungkin disebabkan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo kurang dalam memaksimalkan sistem komputer yang terintegrasi sehingga berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Wajo, agar pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan dan pendampingan operasional sistem komputer serta jaringan internet lebih merata dalam setiap SKPD sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin andal.
- b. Para peneliti selanjutnya agar memperluas lingkup objek penelitian yang meliputi beberapa SKPD di tiap Kabupaten/Kota.
- c. Penelitian selanjutnya selain pemberian kuesioner, peneliti juga mempertimbangkan untuk melakukan wawancara langsung dengan responden agar menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Anggrelia. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketetapanwaktuan Pelaporan Keuangan dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Akuntansi*. Vol.2. No.2. diakses 14 November 2016

Desmiyawati. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan (Study Empiris pada SKPD Pemda Riau.

Jurnal Akuntansi. Vol.2. No.2. diakses April 2014.

Efendi, L., Darwanis., and Abdullah, S. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kaulitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perseptif Ekonomi Darusalam*. Vol.3. No.2. diakses 02 September 2017.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro

Jensen, M., & Meckling, W. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency, and ownership structure. *Jurnal of Conflict Resolution*, Vol.2, No.1.

Kombong, Reni. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja*. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Hasanuddin Makassar.

Majid J, NN Idward, Mediaty, 2018. The Effect of Comptence of Human Resources, Information Technology and Accountability on the Quality of Region Financial Statements with internal System as a moderation. *International Journal of Economics Management and social Science (IJEMSS)*, vol.1 issue 4, 142-155, 2018.

Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Liberty: Yogyakarta.

Pradono, F.C. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:Faktor- Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol.22, No.2.

Pemkab Wajo Gandeng BPK Dalam

- Pengelolaan Dana dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Kata Sulsel.com, 22 Oktober 2019)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* 2014. Jakarta: <http://pt.jayapura>
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010tentang_standar_akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf. diakses 03 November 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.* www.menpan.go.id/rbkunwas/images/pedoman/pemgawasan_Peraturan-Pemerintah-tahun-2008-060-08.pdf. diakses 03 November 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Palembang: BPK Perwakilan Provinsi. <https://palembang.bpk.go.id>. diakses 05 November 2009.
- Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.*
- Sutrino, E. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Singkali, O.Y.F., and Widuri, R. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. *Tax & Accounting Review*. Vol.4. No.2.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 100 & Pasal 101 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* www.jdih.kemenkeu.go.id 2005.
- Yamin, S., And Kurniawan, H. 2014. *SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS*. Salemba Infotek: Jakarta.
- Yanto. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Nilai Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal MPRA*. ISSN: 1907 9486.